

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Manajemen Aset Daerah Palembang

Nabila Salsabilla *1

¹Universitas Indo Global Mandiri ; email: nblasalsabilla@gmail.com

ABSTRAK

Keterbukaan dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang efektif, khususnya dalam pengelolaan aset daerah. Dalam kerangka desentralisasi, pemerintah daerah dituntut mampu mengelola aset secara optimal, efisien, dan akuntabel guna mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Namun, kompleksitas administrasi, koordinasi antar perangkat daerah, serta keterbatasan teknologi masih menjadi kendala utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik, tantangan, dan mekanisme pengelolaan aset di Kota Palembang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur terkait aparatur pemerintah, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kota telah menerapkan berbagai mekanisme untuk memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas, seperti sistem informasi pengelolaan aset, prosedur pelaporan keuangan, serta administrasi inventarisasi dan pengawasan aset. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, antara lain sertifikasi aset yang belum optimal, ketidaksesuaian data antar perangkat daerah, keterbatasan integrasi teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia yang masih terbatas. Dengan demikian, diperlukan penguatan sistem, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi teknologi untuk mewujudkan pengelolaan aset yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata kunci : *akuntabilitas, aset daerah, good governance, transparansi, tata kelola pemerintahan.*

ABSTRACT

Openness and accountability are essential principles in effective governance, particularly in regional asset management. Within the framework of decentralization, local governments are required to manage assets optimally, efficiently, and accountably to support public services and regional development. However, administrative complexity, inter-agency coordination, and technological limitations remain significant challenges. This study aims to analyze the practices, challenges, and mechanisms of asset management in Palembang City. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through literature studies related to government institutions, especially the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña (2014). The findings indicate that the city government has implemented several mechanisms to enhance openness and accountability, including asset management information systems, financial reporting procedures, and inventory administration and asset supervision. Nevertheless, challenges persist, such as suboptimal asset certification, data inconsistencies among regional agencies, limited technological integration, and inadequate human resource capacity. Therefore, strengthening systems, improving human resource capacity, and enhancing technological integration are necessary to achieve more transparent and accountable asset management.

Keywords : *accountability, asset management, good governance, regional assets, transparency*

Pendahuluan

Penerapan prinsip *good governance* dalam administrasi publik menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai elemen fundamental dalam pengelolaan sumber daya publik, termasuk aset daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola keuangan dan aset guna mendukung pembangunan serta pelayanan publik. Konsekuensinya, pengelolaan aset daerah dituntut tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan aset, mengurangi potensi korupsi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Zega & Silaban, 2024; Astuti et al., 2024).

Aset daerah merupakan bagian dari kekayaan pemerintah daerah yang meliputi tanah, bangunan, kendaraan, infrastruktur, peralatan, serta fasilitas publik lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan administratif strategis. Pengelolaan aset daerah yang optimal berperan dalam meningkatkan efisiensi belanja pemerintah, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Sebaliknya, lemahnya tata kelola aset dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti ketidakjelasan status kepemilikan, rendahnya pemanfaatan aset, hilangnya potensi pendapatan daerah, hingga sengketa hukum terkait aset pemerintah (Hidayati, 2025).

Dalam konteks Kota Palembang, pengelolaan aset daerah menjadi isu yang penting mengingat besarnya nilai aset pemerintah daerah yang mencapai sekitar Rp19,1 triliun pada akhir tahun 2024, dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp4,8 triliun dari target Rp5,2 triliun pada tahun 2025 (Iskandar, 2026). Besarnya kapasitas aset tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, praktik pengelolaan aset daerah di Kota Palembang masih menghadapi berbagai permasalahan administratif dan kelembagaan. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya legalitas aset pemerintah daerah. Dari sekitar 6.130 aset yang tersebar di 18 kecamatan dan 107 kelurahan, hanya sekitar 8,25% yang telah memiliki sertifikat resmi (Syarif, 2026). Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengendalian administrasi aset dan berpotensi menimbulkan sengketa kepemilikan, penyalahgunaan aset, serta rendahnya efektivitas pemanfaatan aset daerah.

Secara teoritis, transparansi dalam pengelolaan aset daerah tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan informasi, tetapi juga mencakup kemudahan akses publik terhadap data aset, kejelasan prosedur pengelolaan aset, serta keterbukaan dalam proses inventarisasi dan pemanfaatan aset daerah (Mardiasmo, 2018; Siahay, 2024). Sementara itu, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pelaporan, tetapi juga meliputi kejelasan tanggung jawab pengelola aset, ketepatan pencatatan administrasi, efektivitas pengawasan internal, dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan barang milik daerah (Mahmudi, 2016; Usman et al., 2024). Dalam penelitian ini, transparansi dianalisis melalui indikator keterbukaan informasi aset, aksesibilitas data, dan kejelasan prosedur pengelolaan aset. Adapun akuntabilitas dianalisis melalui indikator sistem pencatatan aset, mekanisme pelaporan, pengawasan internal, dan pertanggungjawaban pengelolaan aset kepada publik.

Penelitian terdahulu umumnya membahas transparansi dan akuntabilitas dalam konteks pengelolaan keuangan daerah yang berfokus pada aspek penganggaran, pelaporan

keuangan, dan pengawasan fiskal (Palowa et al., 2025; Tim, 2025). Beberapa penelitian lain juga membahas tata kelola aset daerah, namun lebih menitikberatkan pada inventarisasi aset atau optimalisasi pemanfaatan aset tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Harahap & Jufrizal, 2023). Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan normatif-administratif dan belum banyak mengkaji bagaimana transparansi dan akuntabilitas diimplementasikan secara empiris dalam praktik pengelolaan aset daerah di tingkat pemerintah kota. Dengan demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang menghubungkan persoalan administrasi aset, legalitas kepemilikan, dan mekanisme pengawasan dalam kerangka transparansi dan akuntabilitas secara terpadu.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) pada fokus kajian yang secara spesifik menganalisis implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dengan menggunakan indikator analitis yang lebih operasional. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek administratif pengelolaan aset, tetapi juga menelaah hubungan antara keterbukaan informasi, legalitas aset, mekanisme pengawasan, dan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan aset publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai tata kelola aset daerah dalam kerangka *good governance*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan aset daerah di Kota Palembang, (2) bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah, dan (3) apa saja kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah (Fadhurrahman, 2025; Badewin et al., 2025). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola aset daerah di Kota Palembang. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kajian administrasi publik khususnya dalam bidang pengelolaan aset daerah, sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kota Palembang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif (Santoso & Sulisnaningrum, 2024; Panggeso et al., 2024).

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah di Kota Palembang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial dan administratif berdasarkan pengalaman, pandangan, serta praktik yang dilakukan oleh para informan dalam pengelolaan aset daerah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif, sehingga hasil penelitian difokuskan pada penggambaran kondisi nyata terkait penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen aset pemerintah daerah.

Subjek penelitian adalah aparatur pemerintah yang memiliki tugas, kewenangan, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan aset daerah. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu, yaitu informan yang memahami proses pengelolaan aset daerah, memiliki pengalaman kerja di bidang terkait, serta terlibat dalam proses perencanaan, pencatatan, pengawasan, maupun pelaporan aset daerah. Informan penelitian terdiri atas pejabat dan pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, perangkat daerah terkait, serta pihak pengawas internal yang memiliki hubungan dengan pengelolaan aset daerah.

Objek penelitian difokuskan pada implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah Pemerintah Kota Palembang. Fokus penelitian meliputi proses perencanaan aset, pencatatan dan inventarisasi aset, pelaporan aset, pengawasan aset, serta keterbukaan informasi kepada publik terkait pengelolaan aset daerah.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan utama serta observasi lapangan terhadap proses pengelolaan aset daerah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti laporan pengelolaan aset daerah, laporan keuangan pemerintah daerah, peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, arsip administrasi, serta data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengetahui kondisi riil pengelolaan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah sebagai data pendukung penelitian.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak awal penelitian hingga penelitian selesai agar diperoleh data yang valid dan mendalam. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi sehingga tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian dapat ditingkatkan.

Hasil

1. Transparansi dalam Pengelolaan Aset Daerah Kota Palembang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palembang telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan aset daerah melalui penyediaan informasi aset, pelaporan keuangan, serta pemanfaatan sistem informasi digital. Transparansi tidak hanya dipahami sebagai keterbukaan informasi administratif, tetapi juga sebagai upaya pemerintah dalam memberikan akses informasi yang memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan aset publik.

Implementasi transparansi diwujudkan melalui penggunaan sistem informasi manajemen aset yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sistem tersebut

digunakan untuk mencatat, menginventarisasi, serta memantau aset daerah secara terstruktur. Aset yang dikelola mencakup tanah, bangunan, kendaraan dinas, infrastruktur, dan aset tetap lainnya. Keberadaan sistem digital ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan akurasi data dan meminimalkan potensi kehilangan maupun penyalahgunaan aset.

Secara substantif, transparansi yang diterapkan telah memenuhi aspek keterbukaan informasi formal sebagaimana dijelaskan dalam teori *good governance*. Menurut teori tersebut, transparansi tidak hanya berarti informasi tersedia, tetapi juga mudah diakses, dipahami, dan digunakan oleh publik dalam proses pengawasan pemerintahan. Dalam konteks penelitian ini, keterbukaan informasi telah dilakukan melalui publikasi laporan keuangan daerah dan laporan kinerja pemerintah pada situs resmi pemerintah daerah. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi yang disajikan masih bersifat umum dan agregatif sehingga masyarakat belum memperoleh akses informasi aset secara rinci.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi transparansi masih berada pada tahap administratif dan belum sepenuhnya mencapai transparansi substantif. Transparansi substantif seharusnya memungkinkan masyarakat mengetahui detail pengelolaan aset, termasuk status pemanfaatan, nilai aset, serta perubahan data aset secara berkala. Dengan demikian, keterbukaan informasi yang tersedia belum sepenuhnya mendukung partisipasi publik secara optimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Permana (2025) yang menyatakan bahwa transparansi pengelolaan aset daerah sering kali masih berfokus pada pemenuhan kewajiban administratif, sementara aksesibilitas dan pemahaman informasi publik belum menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

a. Mekanisme Transparansi Aset

Tabel 1. Mekanisme Transparansi Pengelolaan Aset

Komponen	Bentuk Implementasi	Analisis
Sistem Informasi	Sistem manajemen aset BPKAD	Membantu pencatatan dan monitoring aset secara digital, namun belum terintegrasi antar OPD
Pelaporan	Laporan keuangan daerah	Menjadi bentuk pertanggungjawaban formal pemerintah
Publikasi	Website resmi pemerintah	Meningkatkan akses informasi publik, tetapi data masih terbatas
Pengawasan	Lembaga pengawas dan masyarakat	Pengawasan sudah berjalan, namun partisipasi publik masih rendah

Sumber: Hasil olahan peneliti (2026)

2. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Aset Daerah

Akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah di Kota Palembang diwujudkan melalui kewajiban pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dan pemanfaatan aset kepada lembaga pengawas maupun masyarakat. Bentuk akuntabilitas tersebut terlihat dari penyusunan laporan keuangan tahunan yang memuat informasi mengenai klasifikasi, nilai, dan kondisi aset daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk memastikan keandalan data dan kesesuaian pengelolaan aset dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

memiliki tanggung jawab administratif dalam pencatatan, pemeliharaan, dan pelaporan aset pada unit kerjanya masing-masing.

Jika dianalisis berdasarkan teori akuntabilitas publik, implementasi akuntabilitas di Kota Palembang telah memenuhi dimensi pertanggungjawaban administratif karena adanya pelaporan rutin dan pengawasan formal. Namun, dimensi akuntabilitas kinerja belum berjalan optimal karena masih ditemukan ketidaksesuaian antara data aset pada dokumen administrasi dengan kondisi riil di lapangan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas belum sepenuhnya didukung oleh sistem pengendalian internal yang kuat. Ketidaksesuaian data aset mengindikasikan lemahnya proses verifikasi dan sinkronisasi data antar OPD. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan pengelolaan aset belum dilakukan secara profesional dan berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Meilisa dan Fadli (2024) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan aset daerah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan laporan keuangan, tetapi juga oleh kualitas pengendalian internal dan kompetensi aparatur pemerintah.

a. Permasalahan Akuntabilitas

Permasalahan utama yang ditemukan dalam implementasi akuntabilitas meliputi:

1. Dokumen aset yang belum lengkap dan belum diperbarui secara berkala.
2. Ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi riil aset di lapangan.
3. Keterbatasan kompetensi aparatur dalam pengelolaan aset berbasis digital.
4. Sistem pengendalian internal yang belum berjalan optimal.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berorientasi pada efektivitas pengelolaan aset daerah.

3. Tantangan dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek administratif, kelembagaan, teknologi, maupun sumber daya manusia.

a. Faktor Administratif

Kompleksitas pencatatan aset daerah menjadi kendala utama dalam menjaga akurasi data. Banyaknya jenis aset serta perubahan kondisi aset menyebabkan proses inventarisasi membutuhkan waktu dan koordinasi yang tinggi. Kondisi ini berdampak pada munculnya perbedaan data antar dokumen administrasi.

b. Koordinasi Kelembagaan

Kurangnya koordinasi antar OPD menyebabkan proses sinkronisasi data aset belum berjalan optimal. Setiap OPD memiliki mekanisme pencatatan yang berbeda sehingga menimbulkan inkonsistensi data. Hasil wawancara menunjukkan bahwa:

“Kami masih mengalami kendala dalam sinkronisasi data antar OPD karena masing-masing memiliki sistem yang berbeda” (Hasil Wawancara, Maret 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa lemahnya integrasi kelembagaan menjadi faktor yang memengaruhi kualitas tata kelola aset daerah.

c. Keterbatasan Teknologi

Meskipun pemerintah telah menggunakan sistem digital, implementasinya belum sepenuhnya terintegrasi. Sistem yang belum terkoneksi antar OPD menyebabkan

keterlambatan pembaruan data dan potensi duplikasi informasi aset. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital masih berada pada tahap pengembangan administratif, belum sampai pada integrasi data secara menyeluruh.

d. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Keterbatasan kompetensi aparatur menjadi tantangan penting dalam pengelolaan aset daerah. Sebagian aparatur belum memiliki kemampuan teknis dalam pengoperasian sistem digital maupun pengelolaan administrasi aset secara profesional. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas pencatatan dan pelaporan aset.

Temuan penelitian ini mendukung penelitian Zega dan Silaban (2024) yang menyatakan bahwa lemahnya koordinasi kelembagaan dan keterbatasan SDM merupakan faktor utama rendahnya efektivitas tata kelola aset daerah di pemerintah daerah.

4. Strategi Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah di Kota Palembang.

a. Penguatan Sistem Digital

Pengembangan sistem manajemen aset berbasis digital yang terintegrasi antar OPD menjadi kebutuhan utama. Integrasi sistem dapat meningkatkan akurasi data, mempercepat proses pembaruan informasi, dan meminimalkan duplikasi data aset. Selain itu, sistem yang terintegrasi juga dapat mendukung transparansi publik melalui penyediaan informasi aset secara lebih terbuka.

b. Peningkatan Kapasitas SDM

Pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya dalam bidang pengelolaan aset berbasis teknologi informasi. Peningkatan kapasitas SDM penting untuk mendukung efektivitas implementasi sistem digital dan pengawasan aset daerah.

c. Penguatan Koordinasi Kelembagaan

Koordinasi antar OPD perlu diperkuat melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang seragam serta pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala. Langkah ini penting untuk menciptakan sinkronisasi data dan keseragaman mekanisme pengelolaan aset.

d. Partisipasi dan Pengawasan Publik

Pemerintah daerah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyediaan platform informasi publik yang lebih interaktif dan mudah dipahami. Keterlibatan masyarakat dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan aset daerah sehingga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.

Strategi tersebut sesuai dengan konsep *good governance* yang menekankan pentingnya sinergi antara transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian Pratiwi et al. (2024) juga menegaskan bahwa penguatan sistem digital dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola aset daerah.

5. Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palembang telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah

melalui sistem digital, pelaporan keuangan, dan mekanisme pengawasan administratif. Namun, implementasi kedua prinsip tersebut masih cenderung bersifat formal administratif dan belum sepenuhnya substantif.

Dari perspektif teori *good governance*, transparansi yang baik seharusnya tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga memastikan informasi dapat dipahami dan dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan publik. Dalam penelitian ini, keterbukaan informasi sudah tersedia, tetapi akses terhadap data rinci aset masih terbatas sehingga partisipasi publik belum berjalan optimal.

Sementara itu, akuntabilitas yang diterapkan pemerintah daerah telah memenuhi aspek pertanggungjawaban administratif melalui laporan keuangan dan audit eksternal. Akan tetapi, masih ditemukannya ketidaksesuaian data aset menunjukkan bahwa pengendalian internal dan efektivitas pengelolaan aset belum berjalan maksimal. Dengan demikian, implementasi akuntabilitas masih berorientasi pada kepatuhan administratif dibandingkan optimalisasi tata kelola aset.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini memperkuat temuan bahwa digitalisasi, koordinasi kelembagaan, dan kompetensi SDM merupakan faktor utama dalam keberhasilan tata kelola aset daerah. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan hanya pada ketersediaan sistem, tetapi juga pada kualitas integrasi data, keterbukaan informasi substantif, dan efektivitas pengawasan publik.

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui penguatan integrasi sistem digital, peningkatan kapasitas aparatur, serta perluasan akses informasi publik agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah di Kota Palembang telah dilaksanakan melalui sistem inventarisasi aset, prosedur pelaporan administrasi, serta pemanfaatan teknologi informasi berbasis digital. Implementasi tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan keterbukaan informasi, kemudahan pemantauan aset, serta penyusunan laporan keuangan yang lebih tertib dan sistematis. Selain itu, pembagian tanggung jawab antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut memperkuat mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan aset daerah.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait tata kelola aset daerah berbasis prinsip *good governance*. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi dan prosedur administratif, tetapi juga oleh integrasi sistem digital, koordinasi kelembagaan, serta kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas pengelolaan aset daerah. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara aspek kelembagaan, teknologi, dan kompetensi aparatur dalam menciptakan tata kelola aset publik yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian hanya difokuskan pada pengelolaan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada daerah lain dengan karakteristik birokrasi yang berbeda. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan

deskriptif kualitatif dengan sumber data yang terbatas pada hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga belum mengukur secara kuantitatif tingkat efektivitas implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.

Berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi yang dapat diberikan secara operasional yaitu: (1) Pemerintah Kota Palembang perlu membangun sistem pengelolaan aset daerah yang terintegrasi antar-OPD melalui pembaruan data secara berkala dan sinkronisasi basis data digital; (2) perlu dilakukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang seragam terkait pencatatan, pelaporan, dan verifikasi aset guna meminimalkan ketidakkonsistenan administrasi; (3) peningkatan kapasitas aparatur dapat dilakukan melalui pelatihan teknis rutin mengenai pengelolaan aset berbasis digital dan audit administrasi aset; serta (4) pemerintah daerah perlu menyediakan akses informasi aset tertentu secara terbuka melalui platform digital sebagai bentuk transparansi publik dan penguatan pengawasan masyarakat. Dengan penguatan pada aspek koordinasi, digitalisasi, standar administrasi, dan kompetensi sumber daya manusia, pengelolaan aset daerah di Kota Palembang diharapkan dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam mendukung kualitas pelayanan publik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Referensi

- Astuti, H. P., Ilham, M., & Madjid, U. (2024). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di bpkad pemerintah kota tanjungpinang 1,2,3. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP)*, 10(1), 180.
- Badewin, Elizabeth, R., Rusmardiana, A., Rely, G., & Judijanto, L. (2025). Accountability and Transparency in Local Government Financial Reporting: An Empirical Study in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(4), 838. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i4.3642>
- Birdayanti, Yusriadi, & Ikmal. (2025). Accountability and Transparency in Public Administration for Improved Service Delivery. *Journal Social Civilecial*, 3(1), 38.
- Fadhurrahman, I. (2025). Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Palembang per Desember 2025. In *Databoks* (Issue Desember, p. 1).
- Grasiana, M., Mau, Y., Sari, A. R., & Irianto, M. F. (2025). *Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi , Penerapan Prinsip Transparansi , Pengawasan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (studi kasus di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang)*. 2(4), 1–8.
- Hanifa, M. R., Wahyunengseh, R. D., & Suharto, D. G. (2026). *Beyond Compliance : A Systematic Review of Ethics , Accountability , And Transparency in Indonesian Governance*. January, 85–102.
- Harahap, A. S., & Jufrizal, J. (2023). *The English Students ' Perceptions on Using Edmodo as Media Platform in Blended Learning*. 125–132. <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-33-6>

- Hidayati, A. (2025). Pengaruh tata kelola aset daerah terhadap efisiensi anggaran dan pengeluaran pemerintah 1. *Journal Public Policy Services and Governance*, 01(02), 6.
- Iskandar, D. (2026). *Realisasi Anggaran Pemkot Palembang 2025 Tak Capai Target, PAD 2026 Jadi Tantangan*. RMOL SUMSEL: Republik Merdeka.
- Kusuma, P. F. (2025). *Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah : Tinjauan Literatur Sistematis dan Meta Analisis Sederhana State of the Art dan Kebaruan*. 3.
- Meilisa, M., & Fadli. (2024). Analisis Akuntabilitas Publik Pada Kabupaten/Kota Pemerintah Indonesia. *Edunomika*, 08(01), 8.
- Natisation, A., Esien, E. B., Harjo, D., Agoestyowati, R., Lestari, P. A., & Republic, C. (2022). The Effect of Public Accountability and Transparency on State Financial Management Mechanism: A Quantitative Method Analysis. *Ilomata International Journal of Social Science*, 3(1), 10.
- Palowa, A. R. H., Lantowa, F. D., & Yusuf, F. M. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Transparansi Publik Terhadap Akuntabilitas Keuangan di BKAD Kabupaten Gorontalo. *Junal Akuntansi Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 6(1), 95.
- Panggeso, A. G., Nirwana, & Haliah. (2024). Transparency and Accountability in Public Financial Reporting : Implementation and Challenges in the Digital Era : A Systematic Literature Review. *International Journal of Business and Applied Economics*, 3(6), 980.
- Permana, D. (2025). *Peran teknologi informasi dalam pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien*. 1. 01(02), 19–26.
- Pratiwi, R. I., Haliah, & Kusumawati, A. (2024). The Influence of Transparency, Governance, and Financial Accountability in Managing Financial Reporting in The Public Sector. *International Journal of Education and Life Sciences (IJELS)*, 2(10), 1169.
- Santoso, R., & Sulisnaningrum, E. (2024). Implementation of Good Governance in Public Sector Accounting : Evaluation of Effectiveness in Local Government. *Tamansiswa Accounting Journal International*, 15(1), 149.
- Siahay, A. Z. D. (2024). Building Public Trust through Transparency and Accountability : A Systematic Review of the Role of Public Sector Accounting. *Journal Economic Resources*, 6(2), 430.
- Syarif, M. (2026). *Pemkot Palembang Realisasikan Pendapatan Rp4,8 Triliun pada Tahun 2025*. NERACA: Harian Ekonomi.

- Tim, K. (2025). Kajian Fiskal Regional: Provinsi Sumatera Selatan. *Kementrian Keuangan: Direktorat Jendral Perbendaharaan*, 8(3), 08.
- Usman, J. A., Layuk, P. K. A., & Kambuaya, M. K. . (2024). Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kabupaten Sorong. *Jurnal Akuntansi, Audit, Aset*, 7(2), 20.
- Zega, H. E. N., & Silaban, A. (2024). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparasi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada BPKPD Kabupaten Nias Utara. *Reviu Akuntansi, Keuangan, Dan Sistem Informasi*, 3(2), 508.